

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH**

**Studi Kasus pada Kabupaten Klaten
Tahun 2000-2004**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Theresia Evi

NIM: 012114227

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

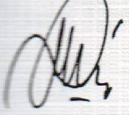
SKRIPSI

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH**
Studi Kasus pada Kabupaten Klaten
Tahun 2000-2004

Oleh:
Theresia Evi . W.
NIM: 012114227

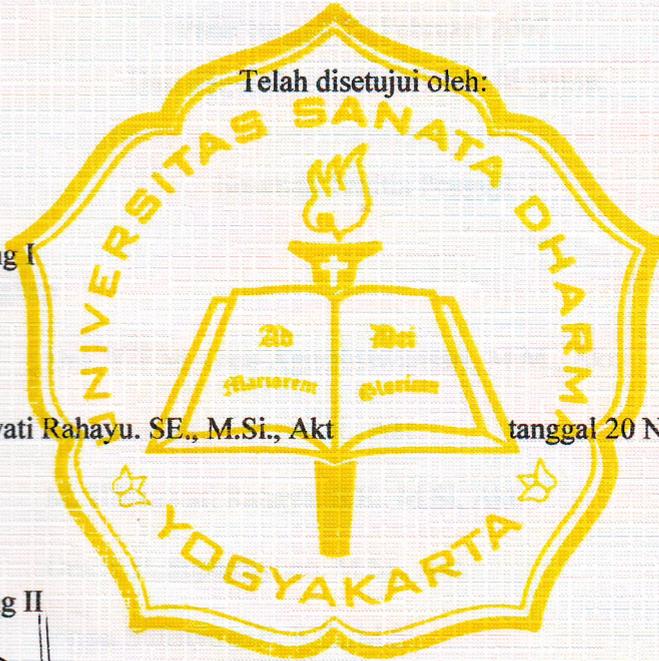
Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



M. Trisnawati Rahayu. SE., M.Si., Akt

tanggal 20 November 2006



Pembimbing II



Drs. Y.P. Supardiyono. M.Si., Akt

tanggal 17 Januari 2007

SKRIPSI

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

THERESIA EVI .W.

NIM: 012114227

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 23 Februari 2007

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Dra. Y.F.M. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.

M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si, Akt.

Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt.

Firma Sulistyowati, S.E., M.Si

Tanda Tangan

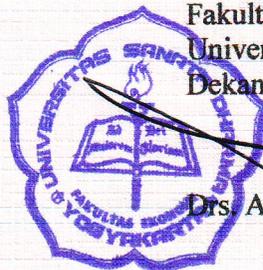
[Handwritten signatures of the five members of the examination committee]

Yogyakarta, 28 Februari 2007

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



[Handwritten signature of the Dean]
Drs. Alex Kahu Lantum., M.S

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

No one can back and make a brand new start
Any one can start from now on and make a brand new ending
God didn't promise days without pain
Laughter without sorrow
Sun without rain
But
He did promise strenght for the day
Comfort for the tears and light for the way
(fushugiyugi)

Dedicated to:

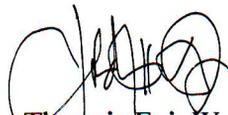
Jesus Christ My Lord
Bapak H. Sri Widodo dan Ibu
Mbak ipung dan Mbak titik
Van Rayn Jr.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain kecuali yang disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 Februari 2007

Yang menyatakan



Theresia Evi . W.

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

Studi Kasus pada Kabupaten Klaten

Theresia Evi

012114227

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2007

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui efektivitas realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten, (2) mengetahui efisiensi biaya pemungutan PBB di Kabupaten Klaten, (3) mengetahui besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Klaten tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis efektivitas, analisis efisiensi dan analisis kontribusi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) realisasi PBB di Kabupaten Klaten belum efektif, (2) biaya pemungutan PBB sudah efisien karena semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik, (3) kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah menunjukkan, PBB memiliki kontribusi kecil terhadap pendapatan daerah sehingga penerimaan pajak dari sektor PBB belum dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

ABSTRACT

CONTRIBUTION ANALYSIS OF LAND AND BUILDING TAX TO REGIONAL REVENUE

A Case Study at Regency of Klaten

Theresia Evi
012114227
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007

This research aimed: (1) know the effectiveness of income realization of Land and Building Tax (LBT) in regency of Klaten, (2) know the efficiency of collection expense of LBT in regency of Klaten, (3) know the contribution of LBT to regional revenue in regency of Klaten in year 2000 up to 2004.

The data collecting techniques used were documentation and interview, while the data analysis technique used were analysis of effectiveness, efficiency analysis and contribution analysis.

The data analysis result indicated that: (1) the realization of LBT in regency of Klaten was not yet effective, (2) the collection expense of LBT had been efficient because the smaller efficiency ratio meant better local government's performance, (3) the contribution of LBT to regional revenue indicated that, LBT had small contribution to regional revenue so that the income from LBT sector not yet entrusted as one of the regional income source.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Bapa di Surga dan Jesus Christ atas kasih dan berkah yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum MS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto. M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. M. Trisnawati Rahayu. SE., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing I.
4. Drs. Y.P. Supardiyono. M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing II
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
6. Kepala dan karyawan BAPPEDA Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang telah memberikan ijin penelitian.
7. Kepala dan karyawan DIPENDA Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang telah memberikan segala data yang diperlukan.
8. Mama, Bapak, Mba' Ipung, Mba' Titik yang telah memberikan segala doa dan dukungannya.
9. Faustin Van Rayn Jr yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Thanks for your support Rayn...*
10. Teman-teman di pandawa : Mas Handoyo, Mas Eko, Bang Jean, Bang Eko, Mbak Atin, Mbak Tatik, Mbak Tutik, terima kasih buat persahabatannya selama ini dan sudah banyak membantu penulis.

11. Mas Agung "UPN VETERAN", terima kasih sudah merelakan waktunya membantu penulis.
12. Edi yang sudah bersedia mengantarkan penulis melakukan penelitian dan membantu penulis sepenuhnya. *Thanks ya eed, jasamu tiada tara..*
13. Teman-teman Akuntansi 2001 khususnya kelas D, terima kasih buat ilmu, pengalaman, dan kebersamaan di USD.
14. Teman-teman di Pandawa 24, terima kasih buat kebersamaannya selama ini.
15. Temen-temen MPT, terima kasih buat saran dan kritiknya.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan dan kemampuan penulis. Segala kritikan dan masukan yang membangun atas skripsi ini akan diterima dan sangat membantu untuk sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi yang jauh dari sempurna ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 28 Februari 2007

Penulis,



Theresia Evi . W.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Unsur-unsur Pajak	9
3. Fungsi Pajak	9
4. Syarat Pemungutan Pajak	10
5. Pengelompokan Pajak	11
6. Tata cara Pemungutan Pajak	12
7. Tarif Pajak.....	13
B. Pajak Bumi dan Bangunan.....	14
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	14

2.	Asas Pajak Bumi dan Bangunan	15
3.	Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.....	15
4.	Obyek Pajak Bumi dan Bangunan	16
5.	Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan	16
6.	Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan.....	16
7.	Pendaftaran, Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	19
C.	Pendapatan Daerah.....	20
D.	Sumber Pendapatan Daerah	
1.	Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.	Dana Perimbangan	24
3.	Pinjaman Daerah.....	25
4.	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.....	26
D.	Efisiensi dan Efektivitas	26
1.	Efisiensi	24
2.	Efektivitas.....	25
BAB III	METODA PENELITIAN	29
A.	Jenis Penelitian.....	27
B.	Subyek dan Obyek Penelitian	27
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
D.	Data yang dibutuhkan.....	30
E.	Metode Pengumpulan Data	30
F.	Teknik Analisis Data	30
BAB IV	GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN	34
A.	Kondisi geografis Kabupaten Klaten	34
1.	Letak Kabupaten Klaten.....	34
2.	Klasifikasi Tanah.....	35
3.	Luas Penggunaan Tanah.....	37
4.	Keadaan Iklim	38
B.	Keadaan Penduduk	39
C.	Pemerintahan.....	42

D. Agama dan Sosio Kultural	42
E. Keuangan Daerah.....	43
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	44
A. Analisis Data	44
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	44
2. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	47
3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah	49
B. Pembahasan	51
BAB VI PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Keterbatasan Penelitian.....	56
C. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	
SURAT IJIN PENELITIAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrasi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten atau kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik menjadi desentralistik.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja pemerintah daerah secara utuh.

Secara umum semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif, dalam hal ini kinerja keuangan positif diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Peran pemerintah daerah akan semakin besar dalam pembangunan diwilayahnya sehingga di dalam pembangunan tersebut pemerintah daerah berusaha untuk menggali sendiri sumber-sumber penerimaan daerahnya. Penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain yang merupakan penerimaan yang sah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang tergolong dalam dana perimbangan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber penerimaan di Kabupaten Klaten. Saat ini Kabupaten Klaten sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang agar dapat sejajar atau mungkin lebih baik dari kota-kota yang ada di Indonesia. Dengan demikian tidak mengherankan apabila berbagai gerakan pembangunan telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten mulai dari perbaikan jalan, trotoar, taman-taman kota dan lain sebagainya, sampai pada pembangunan gedung-gedung perkantoran, untuk melaksanakan pembangunan tersebut sudah barang tentu diperlukan dana yang tidak sedikit, dan salah satu sumber dana tersebut adalah melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan penting di dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten.

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peranan bagi pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu penerimaan pajak dari dana perimbangan dinilai dapat memberikan kontribusi yang berarti karena menurut peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang masuk dalam penerimaan negara, 10% (sepuluh persen) diberikan untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) penerimaan pajak ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Dilihat dari proporsi yang telah ditetapkan tersebut, dapat dilihat kemungkinan dan peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah khususnya pemerintah daerah, diupayakan untuk terus ditingkatkan. Tingkat pencapaian realisasi penerimaan pajak tergantung pada seberapa efektif dan efisien sistem pemungutan pajak yang dilakukan. Belum tercapainya target / realisasi penerimaan pajak dapat terjadi karena belum teradministrasikannya obyek pajak (*land administration*) dengan baik serta adanya kendala administrasi di sejumlah pos penerimaan pajak, sedikit terhambat karena kurangnya transparansi data dari wajib pajak, terlambatnya pelunasan PBB yang dipengaruhi oleh berbagai sebab seperti tingkat pelayanan yang belum baik dan sebagian wajib pajak yang belum membayar PBB-nya. Tapi di sisi lain, bisa disebabkan dana PBB yang tertunda karena belum disetorkan dari instansi pajak kepada pemerintah daerah (Landiyanto, 2005).

Pada saat pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dan tidak lagi tergantung pada pemerintah pusat. Pembiayaan daerah nantinya diserahkan kepada daerah, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memperoleh sumber pendapatannya sendiri terutama dengan cara meningkatkan penerimaan pajaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat dirumuskan permasalahan berupa:

1. Apakah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun 2004 sudah efektif ?
2. Apakah biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun 2004 sudah efisien ?
3. Berapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2000 sampai dengan 2004?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah :

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas realisasi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun 2004.

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun 2004.
3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2000 sampai dengan 2004.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengetahui peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan meningkatkan pendapatan daerahnya khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah bahan referensi dan pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan daerah.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh dalam praktek yang sesungguhnya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari laporan ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan teoritis dari hasil studi pustaka. Uraian mengenai dasar-dasar teori akan dijadikan landasan berpikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh.

BAB III : METODA PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum Pemerintah daerah Kabupaten Klaten yang terdiri dari bagaimana kondisi geografis, keadaan penduduk, pemerintahan, agama dan sosio kultural.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai analisis dan pembahasan yang dibuat untuk menjawab permasalahan pada Bab III.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan akhir yang diambil dari masalah yang telah dianalisis dan dibahas, keterbatasan penelitian dan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Ada berbagai macam mengenai batasan atau definisi pajak menurut para ahli. Berkenaan dengan hal itu dikemukakan tiga definisi mengenai pengertian pajak itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (Zain, 2003: 10-11)

”Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.”

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH. (Mardiasmo, 2003:1)

mengemukakan:

”Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horrace R., yang mewakili Amerika Serikat (Zein, 2003: 11)

mengemukakan definisi pajak sebagai berikut :

”Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun lebih dulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan pemerintahan.”

2. Unsur-unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2003: 1) ada beberapa unsur pajak antara lain:

- a. Iuran dari rakyat kepada kas negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.

- b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak, tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Fungsi Pajak

Dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (budgetaire)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Misalnya: Pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Misalnya : dikenakan pajak yang tinggi terhadap barang mewah.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya menggunakan pajak secara umum dan merata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

5. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam klasifikasinya sebagai berikut :

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak penghasilan

2) Pajak tak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak pertambahan nilai (PPN)

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contohnya : Pajak penghasilan

2) Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

Contohnya : PPN dan PPnBM

c. Menurut lembaga pemungutannya

1) Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contohnya : PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan Bea Cukai

2) Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contohnya :

- a) Pajak Daerah Tingkat I seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- b) Pajak Daerah Tingkat II seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Asas pemungutan pajak

1) Asas domisili (tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan seseorang.

b. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Suatu cara pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

7. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

a. Tarif Sebanding / Proposional

Tarif berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap hasil yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

c. Tarif Progresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif.

Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut Wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo, 2003: 269).

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah (Undang-undang No. 12 tahun 1994) :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- b. Jalan tol,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olah raga,
- f. Galangan kapal, dermaga,
- g. Taman mewah,
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2003: 269)

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda.

3. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2003: 273) :

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.

4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2003: 270) :

Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi ini meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah RI. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

5. Obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2003: 271) :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak,
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri keuangan.

6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan dan untuk daerah tertentu ditetapkan setiap setahun sekali sesuai perkembangan daerahnya. Dengan Keputusan MENKEU No. 523/KMK 04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB telah mengatur pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Standar investasi adalah jumlah yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan atau penanaman dan atau penggalian sumberdaya alam atau budidaya tertentu yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja , bahan dan alat mulai dari awal pelaksanaan sampai tahap produksi.
- b. Objek pajak yang bersifat khusus adalah obyek pajak yang letak, bentuk, peruntukan dan atau penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik khusus.
- c. Dalam hal obyek pajak yang nilai jual permeternya lebih besar dari ketentuan NJOP yang terjadi dilapangan digunakan sebagai dasar pengenaan PBB.
- d. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus, NJOP ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.

- e. Besarnya NJOP sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta usaha bidang perikanan, peternakan dan perairan untuk areal produksi dan atau areal belum produksi ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan ditambah nilai investasi atau nilai penggantian.
- f. Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual.

Sedangkan dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak didaerah pedesaan dengan tetap memperhatikan penerimaan khususnya pemerintah daerah maka Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan:

- a. 40% (empat puluh persen) untuk:
 - 1) Objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,00.
 - 2) Objek pajak perkebunan yang luas lahannya sama atau lebih besar dari 25 hektar yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh BUMN, BUMD maupun berdasarkan kerjasama operasional antara pemerintah dengan swasta.

3) Objek pajak kehutanan tetapi tidak termasuk area blok tebangan dalam rangka penyalenggaraan kegiatan pemegang Hak Penguasaan Hutan, pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu yang pengenaan PBB-nya dilakukan sekaligus dengan pemungutan Iuran Hasil Hutan.

b. 20% (dua puluh persen) untuk obyek pajak lainnya:

Selain terdapat NJOP, terdapat pula Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu obyek pajak yang nilainya terbesar.

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah 0,5% (lima per sepuluh persen). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) atau dengan rumusan :

$$\text{Pajak Bumi dan Bangunan} = \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Jual Kena Pajak} \\ 0,5\% \times (\text{persentase NJKP} \times (\text{NKOP} - \text{NJOPTKP}))$$

7. Pendaftaran, Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Subyek Wajib pajak mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), yaitu surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan Undang-undang dan menyerahkan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal di terimanya SPOP oleh subyek pajak.

Atas dasar SPOP tersebut Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Apabila SPOP tidak dikembalikan tepat waktu maka Dirjen Pajak akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dimana jumlah pajak terutang adalah pokok pajak ditambah denda administrasi 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

C. Pendapatan Daerah

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002: 82-84) pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas /kegiatan operasi entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan. Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk manfaat ekonomi yang diterima oleh entitas pemerintah untuk dirinya.

Pendapatan dikelompokkan menjadi tiga kelompok berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Kelompok PAD diklasifikasikan menjadi empat jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan diatas air, Pajak air di bawah Tanah, Pajak Air Permukaan.

- b. Retribusi Daerah seperti: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan, Retribusi penjualan produksi usaha daerah, Retribusi izin trayek kendaraan penumpang, Retribusi air, Retribusi jembatan timbang, Retribusi kelebihan muatan, Retribusi perizinan pelayanan, dan pengendalian.
 - c. Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan seperti: bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD), bagian laba Perusahaan Daerah, dan hasil investasi pada pihak ketiga.
 - d. Lain-lain PAD yaitu semua PAD yang bukan berasal dari pajak, retribusi dan laba usaha daerah, antara lain: hasil penjualan barang milik daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TP/TGR), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan bunga deposito.
2. Dana perimbangan adalah semua pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kelompok dana perimbangan ini adalah:

- a. Bagi Hasil Pajak seperti: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan pasal 21.

- b. Bagi Hasil Bukan Pajak seperti: provisi sumber daya hutan, pemberian hak atas tanah negara, *Landrent*, penerimaan iuran eksplorasi.
 - c. Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
 - d. Dana Alokasi Khusus adalah dana perimbangan dalam rangka untuk membiayai kebutuhan tertentu.
 - e. Dana perimbangan dari propinsi adalah dana pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari Pemerintah Propinsi.
3. Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan.

D. Sumber Pendapatan Daerah

Sejalan dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah di beri wewenang untuk meningkatkan kinerja daerah dan demokrasi yang dapat memungkinkan tercapainya masyarakat madani, oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan daerah yang berkesinambungan di masa yang akan datang. Untuk bisa melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan dana yang dapat dijadikan sumber pembiayaan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Hasil Pajak Daerah

Undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memungut apa yang disebut pajak daerah. Pajak daerah sendiri merupakan pembayaran iuran oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang di paksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak terdiri dari :

1) Pajak Daerah untuk Daerah Tingkat I

Terbagi atas :

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB)
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan

2) Pajak Daerah untuk Daerah Tingkat II

Terbagi atas :

- a) Pajak hotel dan restaurant.

- b) Pajak penerangan jalan.
- c) Pajak reklame.
- d) Pajak hiburan.
- e) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah di mana kita dapat melihat secara langsung adanya hubungan antara balas jasa yang di terima karena adanya pembayaran retribusi tersebut. Jenis pelayanan yang dapat di kenakan pungutan retribusi di golongan dalam tiga jenis pelayanan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Perusahaan milik daerah adalah penerimaan yang berasal dari hasil penjualan barang dan jasa yang di hasilkan perusahaan daerah.

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari :

a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerimaan Negara ini dibagi dengan imbangan 10 % (sepuluh persen)

untuk pemerintah pusat dan 90 % (sembilan puluh persen) untuk pemerintah daerah.

Bagian daerah dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan Negara dari BPHTB di bagi dengan imbangan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80 % (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.

Penerimaan Negara dari sumber daya alam (SDA), sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan di bagi dengan imbangan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah daerah.

b. Dana alokasi umum

Dana ini di tetapkan sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari penerimaan dalam negeri.

c. Dana alokasi khusus

Dana ini dialokasikan dari APBN kepala daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

3. Pinjaman Daerah.

Pinjaman daerah bersumber dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pinjaman daerah dari dalam negeri bersumber dari pemerintah pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat tanggung jawab tertentu. Efisien dan efektif biasanya bersifat relatif dan komparatif dan bukan bersifat absolut, dalam arti bahwa efisien biasanya dibandingkan dengan suatu ukuran tertentu.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran satu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapainya (Anthony Dearden Berdford, 1993: 203). Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut.

Unit-unit kerja dalam suatu organisasi selain efisien harus efektif karena keduanya merupakan hal yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipilih-pilih. Pusat pertanggung jawaban yang efektif adalah unit kerja yang mampu mempergunakan sedikit mungkin bahan masukan atau sumber daya untuk mencapai suatu tingkat keluaran atau hasil tertentu. Akan tetapi seandainya tingkat keluaran dari unit kerja tidak mencukupi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai kontribusi dari unit

kerjanya, maka dikatakan bahwa unit kerja tersebut tidak atau kurang efektif. Rasio efektivitas PBB menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PBB dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim,2004: 285)

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{RealisasiPenerimaanPBB}}{\text{TargetPenerimaanPBB}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. (Halim, 2004)

2. Efisiensi

Berdasarkan Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992: 163), efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Menurut Anthony, Dearden dan Bedford (1993: 114) mengungkapkan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output terhadap input, atau jumlah output per unit input.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Halim, 2004: 286).

$$\text{Efisiensi PBB} = \frac{\text{BiayaPemungutanPBB}}{\text{RealisasiPenerimaanPBB}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kuran dari 1 (satu) atau

dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang mendalam mengenai suatu unit sosial tertentu yang menghasilkan gambaran yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan pada waktu tertentu. Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah (Pemda) di Kabupaten Klaten.

B. Subyek dan Obyek penelitian

1. Subyek penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) di Kabupaten Klaten.

2. Obyek penelitian

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah data penerimaan daerah Kabupaten Klaten yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan daerah tahun 2000 sampai 2004.

C. Tempat dan Waktu penelitian

Tempat : Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Waktu : Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2006.

D. Data yang dibutuhkan

1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
2. Data Penerimaan PBB Tahun Anggaran 2000/2004.
3. Data Perkembangan Target dan Realisasi Tahun 2000/2004.
4. Biaya Pemungutan PBB tahun 2000/2004.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2000/2004.

E. Metode pengumpulan data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilakukan secara langsung pada subyek penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan mempelajari data-data berdasarkan sumber data sekunder.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk mengetahui apakah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah efektif, digunakan langkah-langkah :
 - 1) Mengambil data realisasi penerimaan PBB selama Tahun 2000-2004.

- 2) Mengambil data Target Penerimaan PBB selama Tahun 2000-2004.
- 3) Memasukkan data Realisasi Penerimaan dan Target PBB ke dalam rumus Efektivitas Pemungutan PBB sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PBB} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

- 4) Memasukkan hasil perhitungan Efektivitas Pemungutan PBB selama tahun 2000-2004 ke dalam tabel Efektivitas PBB.

Tabel 3.1
Contoh Tabel Efektivitas Pemungutan PBB
di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004

Tahun Anggaran (a)	Realisasi Penerimaan PBB (b)	Target PBB (c)	Tk.Efektivitas (b/c)

- 5) Penentuan trend Efektivitas pemungutan PBB selama 5 Tahun Anggaran disajikan dalam bentuk grafik yang ditentukan dengan menggunakan *Software Microsoft Excel*.
2. Untuk mengetahui apakah biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah efisien, digunakan langkah-langkah:
 - 1) Mengambil data biaya pemungutan PBB selama tahun 2000-2004.

- 2) Mengambil data realisasi penerimaan PBB selama tahun 2000-2004.
- 3) Memasukkan data biaya pemungutan PBB dan realisasi penerimaan PBB selama tahun 2000-2004 ke dalam rumus efisiensi PBB sebagai berikut:

$$EfisiensiPBB = \frac{BiayapemungutanPBB}{RealisasiPBB} \times 100\%$$

- 4) Memasukkan hasil perhitungan efisiensi PBB selama tahun 2000-2004 ke dalam tabel efisiensi PBB.

Tabel 3.2
Rencana Contoh Tabel Efisiensi Pemungutan PBB
di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004

Tahun Anggaran	Biaya pemungutan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Tk. Efisiensi (%)
(a)	(b)	(c)	(b/c)

- 5) Penentuan trend efisiensi biaya pemungutan PBB selama 5 Tahun Anggaran disajikan dalam bentuk grafik yang ditentukan dengan menggunakan *Software Microsoft Exel*.
3. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, berapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah, dilakukan dengan Menghitung besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap

Pendapatan Daerah per tahun anggaran ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$Kontribusi PBB = \frac{Realisasi PBB}{Pendapatan daerah} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Rencana Contoh Tabel Kontribusi Pajak Bumi Dan
Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten
Klaten Tahun 2000-2004

Tahun Anggaran (a)	Realisasi PBB (b)	Pendapatan Daerah (c)	Kontribusi (%) (b/c)

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KLATEN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Klaten

1. Letak Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten yang juga dikenal dengan nama '**Kabupaten Seribu Candi**' merupakan satu dari 35 kabupaten yang ada di propinsi Jawa Tengah. Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikenal sebagai salah satu tujuan wisata. Kabupaten klaten terletak antara $7^{\circ}32'19''$ sampai $7^{\circ}48'33''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ}26'14''$ sampai $110^{\circ}47'51''$ Bujur timur.

Kabupaten klaten mempunyai luas 65.556 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta)

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta)

Wilayah kabupaten klaten terdiri dari tiga dataran:

1) Sebelah Utara : Dataran lereng Gunung Merapi

Membentang disebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.

2) Sebelah Timur : Dataran rendah

Membujur ditengah meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.

3) Sebelah Selatan : Dataran Gunung Kapur

Membujur disebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Sedangkan menurut ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Klaten dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) 3,72% terletak diantara ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut.
- 2) 77,52% terletak diantara ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut.
- 3) 12,76% terletak diantara ketinggian 500-1.000 meter diatas permukaan laut.

2. **Klasifikasi Tanah**

Jenis tanah terdiri dari 5 (lima) macam:

- 1) Litosol

Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis, terdapat di daerah Kecamatan Bayat.

2) Regosol Kelabu

Bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier, terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

3) Grumusol Kelabu Tua

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier, terdapat didaerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.

4) Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua

Bahan induk berupa batu kapur napalterdapat didaerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

5) Regosol Coklat Kekelabuan

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier, terdapat didaerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan dan Jogonalan.

Daerah Kabupaten Klaten terbentang di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta yang dilewati jalan raya Yogya-Solo yang mempunyai peranan sangat penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi.

Di samping daerah, mediterania antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta masih terdapat pula beberapa obyek wisata antara lain :

1) Candi

Candi Bubrah, Candi Sewu, Candi Plaosan dan Candi Merak.

2) Makam

Makam Sunan Bayat (Ki Ageng Pandanaran), Makam Pujangga R. Ngabei Rongo Warsito dan Makam Ki Ageng Perwito.

3) Lainnya

Rowo Jombor, Deles Indah, Musium Gula dan Monumen juang 1945 serta Pemancingan Janti.

3. Luas Penggunaan Tanah

Secara administratif Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 Kecamatan, dengan luas wilayah sebesar 65.556 ha atau 2,014% dari luas Propinsi Jawa Tengah yang sebesar 3.254.412 ha. Luas tersebut terdiri dari lahan sawah sebesar 33.541 ha (51,16%) dan lahan bukan sawah sebesar 32.015 ha (48,84%). Luas lahan sawah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,11% dibanding tahun 2003, sedangkan lahan bukan sawah juga mengalami kenaikan sebesar 0,12% dibandingkan dengan tahun 2003.

Tabel 4.1
LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI
PADI SAWAH DAN PADI GOGO
DI KABUPATEN KLATEN Tahun 2004

NO	KECAMATAN	PADI SAWAH			PADI GOGO		
		(HA)	(KU/HA)	(TON)	(HA)	(KU/HA)	(TON)
1	KLATEN SELATAN	818	54.06	4422	-	-	-
2	KLATEN TENGAH	179	53.13	952	-	-	-
3	KLATEN UTARA	140	55.25	773	-	-	-
4	WEDI	1038	54.67	5674	-	-	-
5	KEBONARUAM	970	57.86	5614	-	-	-
6	NGAWEN	1345	58.55	7876	-	-	-
7	KALIKOTES	843	56.89	4795	-	-	-
8	JOGONALAN	1142	56.61	6463	-	-	-
9	GANTIWARNO	1378	58.55	8066	-	-	-
10	PRAMBANAN	945	54.15	5116	-	-	-
11	MANISRENGGO	1751	57.44	10058	-	-	-
12	KEMALANG	59	46.14	274	12	36.89	44
13	KARANGNONGKO	633	57.29	3625	-	-	-
14	JATINOM	212	52.13	1107	45	35.58	160
15	KARANGANOM	929	56.21	5224	-	-	-
16	TULUNG	1587	50.38	7997	195	36.12	704
17	POLANHARJO	1838	59.41	10919	-	-	-
18	PEDAN	878	55.92	4909	-	-	-
19	KARANGDOWO	2062	54.95	11331	-	-	-
20	CAWAS	3871	56.29	21790	-	-	-
21	TRUCUK	2340	55.57	13003	-	-	-
22	BAYAT	678	48.03	3258	-	-	-
23	DELANGGU	1578	59.61	9405	-	-	-
24	CEPER	1205	55.51	6688	-	-	-
25	JUWIRING	1947	59.58	11602	-	-	-
26	WONOSARI	2383	58.29	13893	-	-	-
	JUMLAH	32749		184834	252		908

4. Keadaan Iklim

Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten rata-rata hari hujan di Kabupaten Klaten tahun 2004 sebesar 7 hari. Bila dibandingkan dengan tahun 2003 berarti mengalami kenaikan sebesar 16,67%. Sedangkan rata-rata curah hujan di

Kabupaten Klaten sebesar 146 mm, hal ini bila dibandingkan dengan tahun 2003 berarti mengalami kenaikan.

B. Keadaan Penduduk

Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten Klaten berjumlah 1.127.747 jiwa. Penduduk Klaten didominasi oleh perempuan, pada tahun 2004 jumlah penduduk perempuan berjumlah 569.195 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 558.552 jiwa.

Struktur penduduk di Kabupaten Klaten merupakan struktur penduduk muda, karena penduduk yang berusia 64 tahun ke bawah lebih banyak dari penduduk yang berusia 65 tahun ke atas. Penduduk yang berusia 0-14 tahun berjumlah 282.757 jiwa dan penduduk yang berusia 15-64 tahun berjumlah 729.943 jiwa, sedangkan penduduk

Perincian mengenai kepadatan penduduk per desa dan per Km² di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
LUAS WILAYAH KEPADATAN PENDUDUK per KM² Menurut Kecamatan di
Kabupaten Klaten Tahun 2004

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PER KM ²
1	KLATEN SELATAN	1443	4868	337
2	KLATEN TENGAH	892	43666	4895
3	KLATEN UTARA	1038	42269	4072
4	WEDI	2438	55281	2267
5	KEBONARUAM	967	21605	2234
6	NGAWEN	1697	44060	2596
7	KALIKOTES	1298	36803	2835
8	JOGONALAN	2607	57600	2209
9	GANTIWARNO	2564	40412	1576
10	PRAMBANAN	2443	45965	1881
11	MANISRENGGO	2696	41550	1541
12	KEMALANG	6166	34981	677
13	KARANGNONGKO	2674	38172	1428
14	JATINOM	3653	57073	1562
15	KARANGANOM	2408	49052	2039
16	TULUNG	3200	54892	1715
17	POLANHARJO	2384	45637	1914
18	PEDAN	1917	47821	2495
19	KARANGDOWO	2923	51784	1772
20	CAWAS	3447	65604	1903
21	TRUCUK	3381	80960	2395
22	BAYAT	3943	63731	1616
23	DELANGGU	1878	45762	2437
24	CEPER	2445	63571	2600
25	JUWIRING	2979	61042	2049
26	WONOSARI	3114	62193	1997
	JUMLAH	66595	1256354	55042

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah,

mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya.

Banyaknya angkatan kerja menurut jenis kelamin per kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
BANYAKNYA ANGKATAN KERJA
MENURUT JENIS KELAMIN PER KECAMATAN
TAHUN 2004

NO	KECAMATAN	JML ANGKATAN	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
			L	P	
1	2	3	4	5	6
1	Klaten Selatan	20.847	10.927	9.920	
2	Klaten Tengah	20.577	10.558	10.019	
3	Klaten Utara	24.509	12.265	12.244	
4	Wedi	24.723	12.034	12.689	
5	Kebonarum	28.395	14.301	14.094	
6	Ngawen	29.521	13.891	15.630	
7	Kalikotes	16.530	7.675	8.855	
8	Jogonalan	36.297	17.940	18.357	
9	Gantiwarno	22.632	10.898	11.734	
10	Prambanan	22.607	11.063	11.542	
11	Manisrenggo	22.751	11.893	10.858	
12	Kemalang	31.174	14.381	16.793	
13	Karangnongko	26.894	13.384	13.510	
14	Jatinom	25.050	12.234	12.816	
15	Karanganom	27.750	13.939	13.811	
16	Tulung	31.695	16.183	15.512	
17	Polanharjo	30.597	15.136	15.461	
18	Pedan	32.115	19.114	13.001	
19	Karangdowo	32.725	16.586	16.139	
20	Cawas	34.777	17.506	17.271	
21	Trucuk	42.105	20.757	21.348	
22	Bayat	24.653	11.873	12.780	
23	Delanggu	23.515	12.227	11.288	
24	Ceper	42.175	21.490	20.685	
25	Juwiring	36.050	18.393	17.657	
26	Wonosari	27.099	13.541	13.558	
	JUMLAH	737.763	370.191	367.572	

C. Pemerintahan

Wilayah administratif Kabupaten Klaten terdiri dari satu kota administratif 5 wilayah pembantu Bupati dengan 26 Kecamatan serta 32 desa dan Kelurahan.

D. Agama dan Sosio-Kultural

Agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Klaten terdiri dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha serta ada juga sebagian masyarakat yang menganut Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya agama dan aliran kepercayaan ini akan sangat membantu pembangunan moral masyarakat di Kabupaten Klaten.

Banyak karya-karya yang dihasilkan di Kabupaten Klaten baik yang bersifat fisik maupun yang berisi ajaran yang bersifat kerohanian yang telah berkembang menjadi daya penggerak dalam memberikan corak dan memperkaya kebudayaan. Upacara-upacara adat di Kabupaten Klaten masih sering dilaksanakan seperti Saparan, Ruwahan, Rasulan, Bersih Desa, dan Syawalan. Dalam pelaksanaan upacara adat sering diadakan penyajian kesenian tradisional yang menjadi ciri khas seperti Wayangan, Tayupan dan Yokowiyu.

E. Keuangan Daerah

Sumber pendapatan daerah di Kabupaten Klaten terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - Pajak daerah
 - Retribusi daerah
 - Bagian laba Usaha Daerah
 - Lain-lain penerimaan yang sah
2. Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah/instansi yang lebih tinggi.
3. Dana perimbangan, terdiri dari:
 - Bagi hasil pajak
 - Bagi hasil bukan pajak
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
4. Dana rutin daerah
5. Dana Pembangunan daerah
6. Lain-lain pendapatan yang sah

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peranan bagi pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber penerimaan pajak dari dana perimbangan dinilai dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan pendapatan pemerintah daerah yang didasari oleh peraturan perundang-undangan No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu 90% (sembilan puluh persen) penerimaan pajak akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan 10% akan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dilihat dari proporsi yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, dapat dilihat peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

A. Analisis Data

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas digunakan untuk mengukur bagaimana hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap potensi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Efektivitas ini akan menunjukkan seberapa tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang ditentukan, sehingga efektivitas hanya akan mengukur dari segi out put atau keluaran yang dihasilkannya.

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pemda Kabupaten Klaten menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan yang direncanakan

kemudian dibandingkan dengan target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemda. Efektivitas Pemungutan PBB ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PBB} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Pada tahun 2000, target penerimaan PBB diharapkan sebesar Rp 4.329.425.146 namun realisasi penerimaan yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 3.884.642.431 sehingga diperoleh nilai efektifitas pemungutan PBB sebesar 89,73%. Tahun 2001 , target penerimaan PBB diharapkan sebesar Rp 4.970.565.890 sedangkan realisasi penerimaan yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 4.415.640.342 atau dengan nilai efektifitas sebesar 88,84%. Untuk tahun 2002, target penerimaan PBB diharapkan sebesar Rp 5.425.369.668 sedangkan realisasi penerimaan yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 4.235.709.824 atau dengan nilai efektifitas sebesar 78,07%. Sedangkan pada tahun 2003, target penerimaan PBB diharapkan sebesar Rp 7.973.993.365 sedangkan realisasi penerimaan yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 5.535.695.799 atau dengan nilai efektifitas sebesar 69,42%. Tahun 2004, target penerimaan PBB diharapkan sebesar Rp 6.524.219.832 sedangkan realisasi penerimaan yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp Rp 10.264.469.102 atau dengan nilai efektifitas sebesar 63,56%.

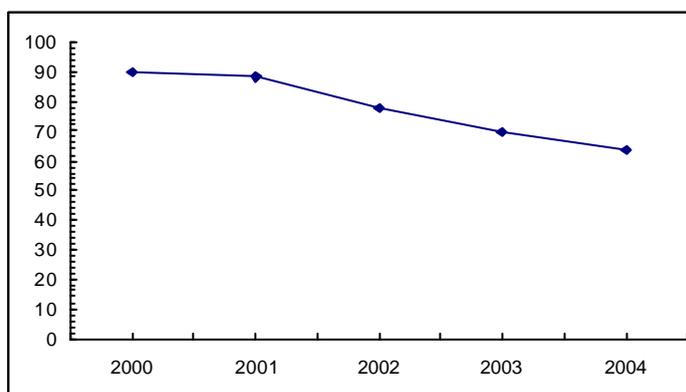
Berdasarkan hasil penelitian, besarnya nilai efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pemda Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Klaten
Tahun 2000-2004

Tahun	Realisasi PBB	Target PBB	Efektivitas (%)
2000	Rp 3.884.642.431	Rp 4.329.425.146	89,73
2001	Rp 4.415.640.342	Rp 4.970.565.890	88,84
2002	Rp 4.235.709.824	Rp 5.425.369.668	78,07
2003	Rp 5.535.695.799	Rp 7.973.993.365	69,42
2004	Rp 6.524.219.832	Rp 10.264.469.102	63,56

Sumber: DIPENDA Kabupaten Klaten

Grafik kecenderungan / trend efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 disajikan pada Gambar 5.1 berikut ini.



Gambar 5.1. Grafik Kecenderungan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 - 2004

2. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Efisiensi biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk mengukur bagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PBB dengan realisasi penerimaan PBB yang diterima.

Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PBB dengan realisasi penerimaan PBB yang diterima. Efisiensi PBB ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$EfisiensiPBB = \frac{BiayapemungutanPBB}{RealisasiPBB} \times 100\%$$

Pada tahun 2000, biaya pemungutan PBB yang digunakan sebesar Rp 124.697.022 dengan hasil realisasi penerimaan PBB yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 3.884.642.431 sehingga diperoleh nilai efisiensi biaya pemungutan PBB sebesar 3,20%. Tahun 2001, biaya pemungutan PBB yang digunakan sebesar Rp 164.122.442 dengan hasil realisasi penerimaan PBB yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 4.415.640.342 sehingga diperoleh nilai efisiensi biaya pemungutan PBB sebesar 3,71%. Untuk tahun 2002, biaya pemungutan PBB yang digunakan sebesar Rp 159.839.957 dengan hasil realisasi penerimaan PBB yang diperoleh pada tahun yang sama

sebesar Rp 4.235.709.824 sehingga diperoleh nilai efisiensi biaya pemungutan PBB sebesar 3,78%. Sedangkan pada tahun 2003, biaya pemungutan PBB yang digunakan sebesar Rp 226.361.787 dengan hasil realisasi penerimaan PBB yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 5.535.695.799 sehingga diperoleh nilai efisiensi biaya pemungutan PBB sebesar 4,09%. Tahun 2004, biaya pemungutan PBB yang digunakan sebesar Rp 412.344.219 dengan hasil realisasi penerimaan PBB yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 6.524.219.832 sehingga diperoleh nilai efisiensi biaya pemungutan PBB sebesar 6,32%.

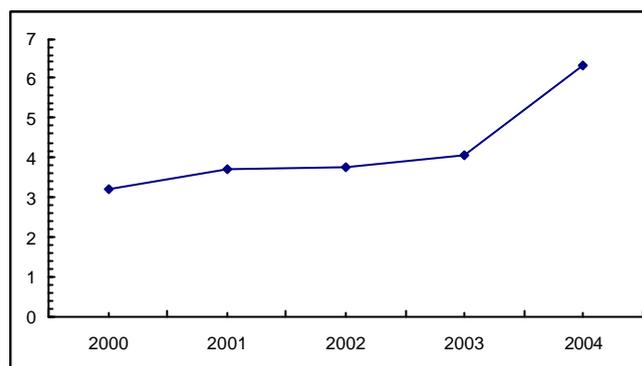
Berdasarkan hasil penelitian, nilai efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pemda Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Klaten
Tahun 2000-2004

Tahun	Biaya Pemungutan PBB	Realisasi PBB	Efisiensi (%)
2000	Rp 124.697.022	Rp 3.884.642.431	3.20
2001	Rp 164.122.442	Rp 4.415.640.342	3.71
2002	Rp 159.839.957	Rp 4.235.709.824	3.78
2003	Rp 226.361.787	Rp 5.535.695.799	4.09
2004	Rp 412.344.219	Rp 6.524.219.832	6.32

Sumber: DIPENDA Klaten

Grafik kecenderungan / trend efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 disajikan pada Gambar 5.2 berikut ini.



Gambar 5.2. Grafik Kecenderungan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 - 2004

Berdasarkan teoritis, nilai efisiensi yang kurang dari 100% atau kurang dari 1 akan menunjukkan kinerja pemda yang semakin baik. Namun masih terdapat kemungkinan penetapan target pajak yang terlalu rendah (*under estimate*) dari target objek pajak yang ada yang menyebabkan pembiayaan pemungutan yang rendah (Supramono, 2003). Selain itu belum teradministrasikannya objek pajak (*land administration*) dengan baik dapat menyebabkan biaya pemungutan yang lebih rendah.

3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah

Pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membantu pembiayaan pembangunan daerah. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah dapat dihitung dengan

membandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan per tahun anggaran dengan realisasi pendapatan daerah pada setiap tahun anggarannya dikalikan dengan 100%. Besarnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah per tahun anggaran ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten pada setiap tahun anggaran dari Tahun 2000 sampai Tahun 2004 disajikan pada Tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap
Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004

Tahun	Realisasi PBB	Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)
2000	Rp 3.884.642.431	Rp 126.579.029.000	3,06
2001	Rp 4.415.640.342	Rp 331.562.378.815	1,33
2002	Rp 4.235.709.824	Rp 424.801.840.600	0,99
2003	Rp 5.535.695.799	Rp 536.558.035.724	1,03
2004	Rp 6.524.219.832	Rp 517.992.150.974	1,25

Sumber : DIPENDA Kabupaten Klaten

Pada tahun 2000, realisasi PBB yang diperoleh sebesar Rp.3.884.642.431 dengan total pendapatan daerah yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 126.579.029.000 sehingga diperoleh besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah sebesar 3,06%. Sedangkan pada tahun 2001, realisasi PBB yang diperoleh sebesar Rp.4.415.640.342 dengan total pendapatan daerah yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 331.562.378.815 sehingga diperoleh besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah sebesar 1,33%.

Untuk tahun 2002, realisasi PBB yang diperoleh sebesar Rp. 4.235.709.824 dengan total pendapatan daerah yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 424.801.840.600 sehingga diperoleh besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah sebesar 0,99%. Tahun 2003, realisasi PBB yang diperoleh sebesar Rp. 5.535.695.799 dengan total pendapatan daerah yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp 536.558.035.724 sehingga diperoleh besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah sebesar 1,03%. Pada tahun 2004, realisasi PBB yang diperoleh sebesar Rp. 6.524.219.832 dengan total pendapatan daerah yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp. 517.992.150.974 sehingga diperoleh besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah sebesar 1,25%.

B. Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugas pemungutan PBB belumlah efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi hasil penerimaan PBB per tahunnya yang tidak mencapai target yang diharapkan dengan nilai rasio efektivitas kurang dari 100% atau dibawah 1. ini menunjukkan kinerja untuk realisasi pemungutan PBB belum optimal.

Berdasarkan hasil penerimaan daerah dan target pajak yang ditetapkan, hasil penerimaan menunjukkan penurunan nilai efektivitas.Pajak Bumi dan Bangunan Pemda Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun. Secara berurutan dari tahun 2000 ke tahun 2004, nilai efektivitas Pajak Bumi dan

Bangunan Pemda Kabupaten Klaten sebesar 89,73%, 88,84%, 78,07%, 69,42% dan 63,56%.

Berbagai faktor dapat menyebabkan tidak tercapainya target atau realisasi penerimaan pajak. Fathan (2003); Erlangga (2005), mengatakan bahwa belum tercapainya target atau realisasi penerimaan pajak dapat terjadi karena adanya kendala administrasi di sejumlah pos penerimaan pajak, sedikit terhambat karena kurangnya transparansi data dari wajib pajak, terlambatnya pelunasan PBB yang dipengaruhi oleh berbagai sebab seperti tingkat pelayanan yang belum baik dan sebagian wajib pajak yang belum membayar PBB-nya. Tapi di sisi lain, bisa disebabkan dana PBB yang tertunda karena belum disetorkan dari instansi pajak kepada pemerintah daerah.

Supramono (2003) mengatakan bahwa tingkat optimalisasi dalam realisasi pajak dan retribusi bukanlah suatu hal yang mudah, dimana optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi bukanlah dilihat dari seberapa jauh ketepatan nilai efektifitas realisasi penerimaan daerah dan target pajak dan retribusi yang ditetapkan. Berdasarkan teoritis, nilai efektivitas yang lebih dari 100% atau lebih dari 1 akan menunjukkan pencapaian target yang optimal. Namun masih terdapat kemungkinan penetapan target yang terlalu rendah (*under estimate*) dapat menyebabkan pencapaian target melebihi atau penetapan target yang terlalu tinggi (*over estimate*) dapat menyebabkan pencapaian target yang tidak sesuai.

Berdasarkan hasil penerimaan daerah dan target pajak dan retribusi yang ditetapkan menunjukkan peningkatan nilai efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pemda Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun. Terdapat adanya peningkatan biaya pemungutan PBB setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan bertambahnya jumlah objek pajak sehingga menambah biaya pemungutan dan administrasi. Secara berurutan dari Tahun 2000 ke Tahun 2004, nilai efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pemda Kabupaten Klaten sebesar 3,20%; 3,71%; 3,78%; 4,09% dan 6,32%.

Kinerja Pemda dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien bila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100% sehingga semakin kecil rasio efisien berarti kinerja Pemda semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemungutan PBB sudah efisien. Hal ini dapat dilihat dari biaya pemungutan PBB dan besarnya realisasi hasil penerimaan PBB per memiliki nilai rasio efisiensi kurang dari 100% atau dibawah 1. Ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas pemungutan PBB telah efisien.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah hanya berkisar antara 0,99% sampai 3,06%, dari tingkat kontribusi dapat dilihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi kecil terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Klaten.

Ismail (2002) menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah yang bervariasi dalam tahun-tahun anggarannya, memiliki peranan yang relatif kecil bagi kemandirian daerah. Hal ini terjadi karena adanya Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang membatasi kreativitas daerah dalam menggali sumber penerimaan aslinya karena hanya menetapkan 6 jenis pajak yang boleh dipungut oleh kabupaten atau kodya. Undang-undang tahun 1997 tersebut menjadi tidak relevan lagi, karena salah satu syarat terselenggaranya desentralisasi fiskal adalah adanya kewenangan pemerintah daerah yang cukup longgar dalam memungut pajak lokal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten pada tahun 2000 sampai dengan 2004 belum efektif karena realisasi hasil penerimaan PBB selama tahun 2000 sampai dengan 2004 kurang dari 100%. Hasil penelitian diperoleh efektivitas PBB selama tahun 2000 sampai tahun 2004 berkisar antara 63,56% sampai 89,73% (tabel 5.1 hal. 46). Ini menunjukkan kinerja untuk realisasi pemungutan PBB belum efektif, karena kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga apabila rasio efektivitas semakin tinggi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004: 135).
2. Biaya pemungutan PBB di Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2000 sampai dengan 2004 sudah efisien. Tingkat efisiensi PBB berkisar antara 3,20% sampai 6,32% (tabel 5.2 hal. 48), dari tingkat efisiensi yang diperoleh dapat dilihat bahwa kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup baik, dapat dilihat dari biaya pemungutan PBB dan besarnya realisasi hasil penerimaan PBB yang memiliki nilai rasio efisiensi kurang dari 100% atau dibawah 1 (satu).

3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2000-2004 berkisar antara 0,99% sampai dengan 3,06%. Pada setiap tahun kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah cenderung menurun, semakin kecil kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan yang dihasilkan menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan masih belum dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan penulis hanya menggunakan data pengamatan selama lima tahun dan memfokuskan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan tanpa memperhatikan penerimaan dari sektor lain.
2. Penelitian hanya dilakukan terhadap data-data pendapatan daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh secara dokumentasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten, sehingga hasil analisis ini signifikan hanya pada data-data dari dinas tersebut.

C. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan terus melakukan upaya pembinaan, penyuluhan dan pelatihan kepada aparat pajak guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan.

2. Dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kabupaten Klaten sebaiknya terus berupaya untuk menempuh langkah-langkah penting dalam upaya menarik dana masyarakat, upaya yang ditempuh yaitu melalui berbagai media massa seperti radio, televisi dan surat kabar, dan dengan pemasangan papan reklame atau slogan-slogan dipinggir jalan, yang kesemuanya berisi perlunya kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelancaran daerah. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Klaten mengembangkan dan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan bangunan secara profesional dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, kenyamanan, kecepatan, dan ketepatan dalam pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Pada penelitian-penelitian yang akan datang, sebaiknya dilakukan dengan pengujian lebih dari satu pemerintah daerah sebagai pembanding.

DAFTAR PUSTAKA

- Aluycius, Subekti Tri Wahjono (1997). Perilaku Masyarakat Terhadap Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kotatip Klaten. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Anonim, (2004). Klaten Dalam Angka. Kabupaten Klaten. *Laporan Tahunan Klaten*. Badan Pusat Statistik.
- Anthony, Robert Newton, John Dearden dan Norton M. Bedford. (1993). *Sistem Pengendalian Manajemen*, (penerjemah: Agus Maulana). Jakarta: Kanisius.
- Bais, Yasinta Dolviana (2003). Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Bastian, Indra, dan Gatot Soepriyanto (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Budiyuono, Nugroho (1989). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan. Jilid 1*. Yogyakarta: BPFE
- Devas, Nick (1987). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Fathan, Muhammad (2003). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah. *Tesis*. Yogyakarta: PPS-UGM
- Halim, Abdul (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN
- Haning, Dedi (2005). Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1, 66-77. Yogyakarta: UKDW
- Ismail, M. (2002). Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi*. Malang: FE Universitas Brawijaya
- Jupp, Kenneth (2000). Land Value Taxation Article. *//http//.www. Google. Com*. Reprinted from Land and Liberty, Winter
- Kuncoro, Antonius (2005). Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Landiyanto, Erlangga Agustino (2005). Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Mamesah, DJ (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Mardiasmo (2003). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Santino, Joko (2006). Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali. *Tesis*. PPS-UGM. Yogyakarta (*tidak dipublikasikan*)
- Supramono (2003). Posisi Pajak dan Retribusi sebagai Sumber Penerimaan Daerah di Kota Semarang. *Jurnal Studi Pembangunan*. Vol. XV, No. 1, 19-36. Yogyakarta: UGM
- Susanto, Stefanus Hery (2003). Kontribusi, Perkembangan dan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Saifullah (2004). Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah. *Tesis*. Yogyakarta: PPS-UGM
- Undang-Undang Pajak No. 22 Pasal 79 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Daerah*
- Wua, Veronika Stefania (2002). Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Zain, Mohammad (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2000
Kabupaten Klaten**

Ayat	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rp)	Persentase
	1	2	3
01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yg lalu	3.648.659.799,00	92,58
02	Pendapatan Asli daerah sendiri	6.598.582.386,00	111,18
		2.134.681.000,00	88,06
	2.1 Pos Pajak Daerah	2.981.743.940,00	124,18
	2.2 Pos Retribusi Daerah	956.000.000,00	117,88
	2.3 Pos Bagian Laba Usaha Daerah	526.156.486,00	198,55
	2.4 Lain-lain PAD yang sah	114.931.035.363,00	91,41
03	Bagian Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan Atau Instansi yang lebih tinggi	7.337.748.719,00	130,76
		91.573.840.394,00	87,95
		16.019.446.250,00	100,10
	3.1 Pos Bagi Hasil/Bukan Pajak		
	3.2 Pos Dana Rutin Daerah		
	3.3 Pos Dana Pembangunan Daerah		
04	Lain-lain Pendapatan Yang sah	1.400.751.194,00	-
	Jumlah penerimaan	126.579.028.742,00	92,58
	% PADS terhadap pendapatan daerah	5,21	

**Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2001
Kabupaten Klaten**

Ayat	Jenis Penerimaan	Jumlah (000 Rp)	Prosentase
	(1)	(2)	(3)
01.	Sisa lebih Perhitungan anggaran tahun lalu	5.333.308,042	1,61
02.	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	13.811.842,903	4,17
	2.1 Pos Pajak Daerah	4.834.843,534	1,46
	2.2 Pos Retribusi Daerah	5.454.192,891	1,65
	2.3 Pos Bagian Laba BUMD	1.240.000,000	0,37
	2.4 Pos lain-lain yang sah	2.292.806,478	0,69
	Pendapatan dari		
03.	Pemerintah/instansi yang lebih tinggi	298.096.331,879	89,91
	3.1 Bagi hasil pajak/bukan pajak	10.459.382,934	3,15
	3.2 Dana Rutin Daerah	35.336,945	0,01
	3.3 Dana Pembangunan Daerah	287.601.612,000	86,74
04.	Lain-lain Penerimaan Yg sah	14.300.895,991	4,31
	Jumlah penerimaan	331.562.378.815	100

**Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2002
Kabupaten Klaten**

Ayat	Jenis Penerimaan	Jumlah (000 Rp)	Prosentase
	(1)	(2)	(3)
01.	Sisa lebih Perhitungan anggran tahun lalu	11.275.557,831	2,91
02.	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	17.519.438,716	4,51
	2.1 Pos Pajak Daerah	6.312.724,519	1,63
	2.2 Pos Retribusi Daerah	7.149.352,235	1,84
	2.3 Pos Bagian Laba BUMD	1.296.000,000	0,33
	2.4 Pos lain-lain yang sah	2.761.361,962	0,71
03.	Dana Perimbangan	344.393.134,467	88,82
	3.1 Bagi hasil pajak	12.261.820,627	3,16
	3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak		0,12
	3.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	452.263,840	85,54
		331.679.050,000	
04.	Lain-lain Penerimaan Yg sah	14.575.389,539	3,76
	Jumlah penerimaan	424.801.840.600	100

**Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2003
Kabupaten Klaten**

Ayat	Jenis Penerimaan	Jumlah (000 Rp)	Prosentase
	(1)	(2)	(3)
01.	Sisa lebih Perhitungan anggaran tahun lalu	23.491.414,478	4,38
02.	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	22.288.967,164	4,51
	2.1 Pos Pajak Daerah	8.605.562,041	1,60
	2.2 Pos Retribusi Daerah	7.730.843,789	1,44
	2.3 Pos Bagian Laba BUMD	1.146.406,000	0,21
	2.4 Pos lain-lain yang sah	4.806.155,515	0,90
03.	Dana Perimbangan	437.351.932,487	81,51
	3.1 Bagi hasil pajak	21.993.885,243	4,10
	3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	671.911,244	0,13
	3.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	409.386.136,000	76,30
	3.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.300.000,000	0,99
04.	Lain-lain Penerimaan Yg sah	16.839.434,292	3,14
	4.1 Penerimaan dari propinsi	16.839.434,292	93,18
05	Bagian Urusan kas dan perhitungan	36.586.287,303	6,82
	Jumlah penerimaan	536.558.035,724	100

**Realisasi Penerimaan Daerah Tahun 2003
Kabupaten Klaten**

Ayat	Jenis Penerimaan	Jumlah (000 Rp)	Prosentase
	(1)	(2)	(3)
01.	Sisa lebih Perhitungan anggran tahun lalu	15.886.341.243	3,07
02.	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	27.177.367.787	5,25
	2.1 Pos Pajak Daerah	10.291.535.387	1,99
	2.2 Pos Retribusi Daerah	8.613.692.694	1,66
	2.3 Pos Bagian Laba BUMD	1.195.358.000	0,23
	2.4 Pos lain-lain yang sah	7.076.781.706	1,37
03.	Dana Perimbangan	417.521.164.117	80,61
	3.1 Bagi hasil pajak	24.408.273.496	4,71
	3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	737.890.621	0,14
	3.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	382.345.000.000	73,82
	3.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	10.030.000.000	1,94
04.	Lain-lain Penerimaan Yg sah	57.337.227.827	11,07
	4.1 Penerimaan dari propinsi	24.388.430.827	4,71
	Penerimaan dari pemerintah pusat	32.948.847.000	6,36
	Jumlah Penerimaan	517.922.150.974	100

**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004
(Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi
2000	10.264.469.102	6.524.219.832
2001	7.973.993.365	5.535.695.799
2002	5.425.369.668	4.235.709.824
2003	4.970.565.890	4.415.640.342
2004	4.329.425.146	3.884.642.431

**Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2000-2004
(Rupiah)**

Tahun	Biaya Pemungutan
2000	124.697.022
2001	164.122.442
2002	159.839.957
2003	226.391.787
2004	412.344.219



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)**

Jalan Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272) 321046 Psw 314 – 318 Faks 328730
KLATEN 57424

SURAT IJIN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 072/676 /II /11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kab. Klaten
 3. Surat rekomendasi ijin dari Ketua Program Studi Akuntansi UNIVERSITAS SANATA DHARMA Tanggal: 20 Juni 2006 Nomor : 31/Kapordi Akt/171/VI/2006.....
 4.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan penelitian/Survey di Daerah Kabupaten Klaten Kepada :

Nama :Theresia Evi.....

Pekerjaan/Mahasiswa :Universitas Sanata Dharma.....

Alamat :Borongan, Polanharjo, Klaten.....

Penanggungjawab :Ir. Drs. Hensiadi Yuli Hartanto, M.Si, Akt.....

Judul/Tujuan :ANALISIS PERANAN PAJAK BILIK DAN BAYUHAL TERHADAP.....
.....PENDAPATAN DAERAH!!.....

Lokasi :Kabupaten Klaten.....

Lamanya :Juli s/d Agustus 2006.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil penelitian/survey kepada Kabupaten Klaten 1 (Satu) Exemplar
2. Sebelum melaksanakan penelitian/Survey dimulai harus menghubungi pejabat setempat
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya penelitian/Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya

Tembusan Surat ini dikirim Kepada :

1. Nekan Kesbanglinmas Kab. Klaten
2. Ka. Dipenda Kabupaten Klaten
3. Ka. KPPBB Kabupaten Klaten
4. Ka. BPS Kabupaten Klaten
5. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unv.Sanata Dharma
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Klaten, 4...Juli...2006.....

An. BUPATI KLATEN

Kepala Badan Perencanaan Daerah

